

Refleksi Serangan Oemoem

OLEH HENDRA KURNIAWAN



Sebagai kota sarat sejarah, Yogyakarta menorehkan banyak kisah bagi perjalanan bangsa, di antaranya pernah menjadi ibu kota negara. Kota Budaya ini menjadi saksi perjuangan eksistensi Republik Indonesia di mata internasional. Setelah proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Belanda berupaya mengembalikan kekuasaan. Dia melanggar Perjanjian Linggarjati dengan melancarkan agresi aksi polisional.

Agresi I meletus pada 21 Juli 1947 yang membuat ibu kota harus dipindahkan dari Jakarta ke Yogyakarta. Konflik ini berakhir melalui Perjanjian Renville yang merugikan karena adanya garis demarkasi Van Mook sehingga wilayah RI makin sempit. Belanda kembali mengingkari perjanjian. Agresi Militer II atau Operasi Kraai (Burung Gagak) dilancarkan Belanda tanggal 19 Desember 1948 untuk menaklukkan Yogyakarta sekaligus menawan para pemimpin RI. Peristiwa inilah yang melatarbelakangi Serangan Oemoem (SO) 1 Maret 1949.

Tahun ini merupakan peringatan ke-66 SO. Keberhasilan Belanda menduduki Yogyakarta dalam Agresi Militer II dirasa belum lengkap. Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat pascaserangan terus menurun. Banyak warga terpaksa hidup dalam kekurangan dan menjual barang-barang berharganya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Penduduk tersisa hanyalah orang tua, perempuan, dan anak-anak. Tentu situasi ini sangat tidak menguntungkan bagi Belanda.

Para pemuda bersama TNI hijrah ke luar kota dan mengatur strategi perang gerilya. Keputusan perang gerilya diambil Panglima Besar Soedirman. Soeharto saat itu berpangkat Letkol menjabat Komandan Brigade X sekaligus Komandan Wehrkreise III yang bertanggung jawab atas wilayah Karesidenan Yogyakarta juga harus bergerak ke luar kota.

Kondisi pemerintahan sangat lemah. Belanda berusaha memaksa para pegawai tetap bekerja, namun ditolak karena rakyat Yogyakarta begitu menjunjung tinggi Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Penduduk berdalih menunggu *dhawuh* (perintah) Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Mencermati situasi ini, Belanda berupaya menemui Sultan dan menjanjikan kedudukan wali negara apabila Sultan

bersedia bekerja sama. Sultan menolak dengan tegas, bahkan meminta agar Belanda segera angkat kaki dari wilayahnya.

Situasi sangat tidak kondusif karena propaganda Belanda di luar mengklaim bahwa RI telah bubar dan TNI tidak ada. Penangkapan para pemimpin sipil semakin memperparah kondisi. Sultan melalui radio me-

kota. Inilah simbol bersatunya kekuatan sipil dan militer untuk menegakkan kedaulatan RI.

Semangat

SO 1 Maret dalam sejarahnya mengandung banyak kontroversi. Akan tetapi sebagai sebuah bangsa besar yang dilahirkan melalui perjuangan keras dan pengorbanan, ada baiknya gene-

« Salah satu yang penting ialah keberhasilan serangan ini dilandasi semangat persatuan seluruh elemen bangsa: pemimpin sipil, militer, dan potensi rakyat. »

nantap berita bahwa Dewan Keamanan PBB akan mengadakan sidang Maret 1949 untuk membahas perkembangan Indonesia.

Sultan memikirkan strategi agar dapat memengaruhi jalannya sidang. Dia ingin menunjukkan ke internasional bahwa RI masih ada dan TNI tetap kuat. Dengan demikian propaganda Belanda tidak mempan.

Sultan segera mengirim surat pada Panglima Besar Soedirman yang tengah bergerilya untuk meminta izin mengadakan serangan terhadap kekuatan Belanda di Yogyakarta pada siang hari. Usulan ini disetujui dan disarankan agar Sultan berhubungan langsung dengan Letkol Soeharto untuk membicarakan lebih lanjut. Pertemuan Sultan dengan Soeharto terjadi di Keraton pada Februari 1949. Mereka sepakat untuk melakukan serangan umum secara serentak dan terkoordinasi.

Keberhasilan pasukan Republik menduduki kota Yogyakarta dalam 6 jam sudah menjadi pukulan telak bagi pasukan Belanda saat itu. Di sisi lain kesuksesan serangan juga membuka mata dunia bahwa negara ini masih eksis. Dukungan kemudian mengalir ke Indonesia, sementara Belanda justru menuai kecemasan. Kerja sama pasukan Republik di wilayah-wilayah sekitar Yogyakarta juga sangat berpengaruh karena berhasil mencegah bantuan tentara Belanda.

Warga sipil bahu-membahu membuat dapur umum menyiapkan makanan untuk para gerilyawan. Mereka berbau dengan TNI memenuhi jalan-jalan utama



KORAN JAKARTA/ONES

rasi muda memaknai SO 1 Maret ketimbang memperbincangkan kontroversinya tanpa akhir. Salah satu yang penting ialah keberhasilan serangan ini dilandasi semangat persatuan seluruh elemen bangsa: pemimpin sipil, militer, dan potensi rakyat.

Meskipun sudah 66 tahun, maknanya masih sangat relevan bagi bangsa saat ini. Indonesia adalah bangsa yang besar dengan aneka ragam suku, agama, dan pembeda lainnya. Kemajemukan tidak perlu dipersoalkan karena justru dapat menjadi modal pembangunan bangsa.

Tinggal masyarakat dalam menerima perbedaan dan menghargainya satu sama lain sebagai bagian kehidupan sosial sehari-hari. Sekarang terlihat, ma-

syarat relatif semakin dewasa dalam mengimplementasikan nilai persatuan demi terwujudnya harmoni.

Lain halnya dengan dinamika politik, perbedaan pendapat dan konflik kepentingan telah menjadi makanan sehari-hari. Tensi politik kian tinggi bahkan isu kriminalisasi dan hukum terang-terangan dijadikan alat. Prediksi lama tentang ketidakharmonisan antara lembaga eksekutif dan legislatif kini merambah ke lingkaran yudikatif.

Perseteruan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri baru reda. Presiden Jokowi telah untuk membatalkan pelantikan Budi Gunawan sebagai Kapolri. Presiden juga mengangkat Taufiequrachman Ruki, Indriyanto Seno Adji, dan Johan Budi sebagai pimpinan sementara KPK. Abraham Samad dan Bambang Widjojanto dinonaktifkan pascapenetapan sebagai tersangka. Kini muncul persoalan baru, para tersangka korupsi berbondong-bondong mengajukan sidang praperadilan sebagai efek Sarpin.

Bagaimanapun upaya saling memperlemah lembaga tentu tidak bijak. Polri, pengadilan, maupun KPK memiliki peran dan tanggung jawab penegakan hukum termasuk pemberantasan korupsi.

Tindak pidana korupsi seakan telah menjadi habitus yang sulit dihabisi.

Becermin dari persatuan elemen pemerintahan dengan rakyat saat Serangan Fajar, kini juga diperlukan jiwa kepemimpinan yang mampu menyatukan keduanya. Para penyelenggara negara harus kembali pada cita-cita proklamasi dan semangat revolusi yang pernah digelorkan bersama dalam mengusir kolonial.

Tentu dibutuhkan komitmen tinggi untuk menanggalkan keinginan menonjolkan diri sendiri dan mencari keuntungan pribadi. Keberlangsungan bangsa dan negara bukan untuk generasi sekarang saja, tapi juga masa datang. ■

Penulis dosen Pendidikan Sejarah Universitas Sanata Dharma Yogyakarta